

## BAB V

### KESIMPULAN REKOMENDASI DAN IMPLIKASI PENELITIAN



Berdasarkan hasil kajian data dan teori dan pembahasan temuan pada bab sebelumnya, penelitian ini berujung pada tiga bagian akhir, yaitu: (1) kesimpulan penelitian, (2) rekomendasi bagaimana melaksanakan Pendidikan Nilai dalam MKDU, dan (3) implikasi hasil temuan.

#### A. KESIMPULAN

Setelah mempelajari dan mengkaji pelaksanaan pendidikan nilai di lingkungan MKDU FPIPS UPI Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa:

Isi pesan nilai yang diemban dalam matakuliah-matakuliah yang tergabung dalam MKDU (pendidikan umum), khususnya matakuliah-matakuliah yang tergabung dalam MPK, kebanyakan adalah nilai moral yang sifatnya etis dan normatif. Isi pesan nilai ini pada tataran teoritis-formal sudah tertuang dalam MKDU, bahkan mencerminkan Tujuan Pendidikan Nasional (lihat USPN), namun dalam tataran praksis isi pesan nilai belum dijabarkan secara terinci. Pembahasan materi dalam pokok-pokok bahasannya tidak menjelaskan secara eksplisit nilai-nilai yang akan diajarkan pada siswa.

Ketidajelasan isi pesan nilai disebabkan karena beberapa hal. Pertama, dari lapangan ditemukan fakta bahwa pendidikan umum belum diposisikan sebagai pendidikan nilai. Sehingga nilai belum dieksplorasi secara lebih mendalam dalam

MKDU. Kedua, dari kajian teoritis ditemukan bahwa tradisi panjang dunia pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh logika positivisme dan empirisisme yang hanya menekankan pada pencapaian kemampuan kognitif (IQ) semata, menyebabkan kemampuan-kemampuan lain, seperti EQ dengan SQ masih belum tersentuh. Ketiga, kesalahpahaman yang menyatakan bahwa kemampuan intelektual hanya bergantung pada kemampuan intelegensi (IQ) semata sebagai “kecerdasan tunggal yang menentukan masa depan seseorang”, membuat dunia pendidikan hanya mementingkan pencapaian kemampuan kognitif. Walaupun dewasa ini Gardner (1995) menyatakan bahwa IQ itu mempunyai spektrum yang lebih lebar meliputi tujuh varietas utama. Ide tersebut pada gilirannya melahirkan ide tentang kemampuan emosional (EO).

Pemahaman dan perspektif dosen mengenai konsep-konsep tentang nilai dan pendidikan nilai masih sangat kurang. Kebanyakan dosen tidak mengetahui konsep-konsep atau istilah-istilah yang berhubungan dengan nilai dan pendidikan nilai. Padahal pembelajaran nilai sangat berguna bagi pembentukan pribadi-pribadi yang baik.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip pendidikan dosen-dosen MKDU sebenarnya diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan yang benar untuk berperilaku sesuai tatanan nilai moral dan norma. Menyitir dari Kosasih Djahiri (2004) selain dituntut menguasai intelektualitas yang tinggi, insan bermoral juga dituntut untuk melakukan proses *valuing* (*emoting, spiritualizing*) sesuai dengan *norm reference* yang ada sebelum ia mengambil keputusan dalam tindakannya. Pertanyaanya adalah bagaimana siswa dapat melakukan proses-proses tersebut, jika dosennya sendiri tidak menguasainya?

Metoda yang digunakan kebanyakan dosen tidak didasari prinsip-prinsip pendidikan nilai. Seringkali dosen hanya menggunakan metoda-metoda tradisional seperti ceramah, diskusi, tugas, dan presentasi. Dan dari kesemua metoda yang sering digunakan terungkap bahwa metoda "ceramah" sangat dominan. Hal ini berarti pula bahwa banyak dosen tidak atau belum menguasai model-model pendidikan nilai secara aplikatif. Hal ini menciptakan situasi *teacher-student subordinate*, dimana dosen menjadi tidak demokratis; kurang memberikan kesempatan yang luas bagi siswa.

Patrick (1995) mengatakan bahwa dosen yang demokratis sangat diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan misalnya, karena ia bertanggung jawab mengembangkan materi-materi yang menarik dan menantang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan siswa membaca, berpikir, dan membuat rencana untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik.

Dosen yang demokratis disertai keluasan pengetahuannya tentang model-model pendidikan nilai sangat penting artinya untuk membantu siswa dalam mengklarifikasi ataupun mengeksplorasi siswa melalui pengujian yang kritis disesuaikan dengan konteks yang berbeda-beda. Contohnya untuk membantu siswa agar dapat mengambil keputusan yang benar sesuai dengan referensi norma yang mereka yakini digunakan model *value clarification*, yaitu dengan membantu memperjelas nilai-nilai yang mereka yakini. Jika masalahnya berhubungan dengan konteks sosial dosen bisa mengaplikasikan model *rational building* yang bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan sikap moral yang benar melalui analisis rasional terhadap situasi-situasi sosial yang berlangsung di masyarakat.

Materi pendidikan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nilai. Materi terlalu terfokus pada pemahaman pengetahuan faktual (kognitif) semata bukan pada bagaimana mengeksplorasi atau mengklarifikasi nilai. Materi seharusnya lebih sarat dengan nilai yang dimaksudkan untuk melengkapi kekurangan kemampuan intelektual dengan kemampuan emosional dan kemampuan spiritual. Nilai harus dituangkan tidak saja pada tataran teoritis-yuridis, tapi pada tataran praksis-operasional. Nilai-nilai yang akan diajarkan harus dituangkan juga di dalam pokok-pokok bahasan materi. Sehingga pendidikan bisa diposisikan sebagai pendidikan nilai. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin terjadinya proses *emoting* dan *spiritualizing* yang selama ini tidak terjadi dalam pendidikan umum.

Evaluasi pendidikan umum sebagai pendidikan nilai masih berorientasi pada test yang dilandasi logika positivisme. Hal tersebut masih terlihat dari dominasi bentuk *paper pencil test* dalam UTS dan UAS sebagai bentuk evaluasi pendidikan nilai. Dimana jenis test tersebut butir-butir pertanyaannya menuntut kemampuan "factual judgement", bukan "value judgement" atau Kohlberg menyebutnya "moral judgement".

Untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program pendidikan diperlukan sebuah alat ukur/test. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah test tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur? Untuk mengukur kecakapan intelegensi, memang tepat bila digunakan *paper pencil test* yang berupa UTS dan UAS, tetapi untuk mengukur hasil pembelajaran "nilai" masalahnya menjadi sangat berbeda.

Untuk mengukur hasil pembelajaran nilai menurut Nunnally (1978), dalam bukunya "Psychometric Theory", bisa digunakan test *rating scale* yang mirip dengan

Untuk mengukur hasil pembelajaran nilai menurut Nunnally (1978), dalam bukunya "Psychometric Theory", bisa digunakan test *rating scale* yang mirip dengan pengukuran yang digunakan dalam test kepribadian/personaliti. Contoh testnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah anda setuju kalau materi Pancasila diperkaya sesuai dengan kemajuan zaman? Sangat tidak setuju -1-----2-----3-----4-----5-----6- sangat setuju

Bentuk tes seperti ini biasa juga disebut *numerical scale* dan biasanya berupa sekumpulan daftar pertanyaan yang posisinya berada disebelah kiri dan kolom kosong di sebelah kanan yang diperuntukkan untuk mengisi jawabannya. Dimana jawaban tersebut berupa angka 1 sampai 6, yang mempunyai makna sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Agak tidak setuju
4. Agak setuju
5. Setuju
6. Sangat setuju

Banyak faktor tidak mendukung pelaksanaan pendidikan nilai di FPIPS UPI, seperti: Tidak ada rambu-rambu yang jelas untuk melaksanakan pendidikan nilai di lingkungan MKDU IPS UPI. Dari penelitian terungkap bahwa rambu-rambu yang ada ternyata bukan untuk melaksanakan pendidikan nilai. Hal ini terjadi karena kurikulum MKDU tidak diposisikan sebagai kurikulum Pendidikan Nilai.

Alat bantu pengajaran yang sangat terbatas (OHP tidak tersedia), juga jumlah infokus yang sangat terbatas juga mejadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pendidikan nilai dalam MKDU.

Jumlah mahasiswa yang berlebih dibanding dengan rasio dosen menyebabkan proses pembelajaran tidak berlangsung optimal. Selain itu dosen yang melaksanakan tugas mengajar yang terlalu berlebihan menjadi terjebak dalam "rutinitas mengajar" dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya, dalam artian informal (mengikuti pelatihan, seminar atau lokakarya), maupun formal (melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 atau S3).

Perlakuan administratif yang berbeda secara kelembagaan yang dialami jurusan MKDU membuat banyak dosen bekerja kurang optimal. Hal tersebut menyebabkan adanya pengaruh psikis yang kurang baik terhadap kinerja dosen yang merasa kurang dihargai.

Matakuliah-matakuliah umum yang tergabung dalam MKDU seringkali dimarjinalkan hanya sebagai kuliah tambahan yang tidak penting, hanya sebagai syarat kelulusan sarjana. Hal tersebut membuat pendidikan umum yang tadinya bertujuan untuk melengkapi kecakapan intelegensi (IQ) dengan kecakapan-kecakapan lain, seperti EQ dan SQ tidak berjalan sesuai tujuannya.

MKDU, terutama Pancasila juga sering diidentikkan sebagai alat untuk memperpanjang hegemoni orde baru. Pendidikan nilai dalam MKDU harus bisa menghilangkan citra buruk tersebut dengan cara mensosialisasikan tujuan pendidikan nilai dengan cara yang baik dan benar.

Singkatnya, bisa dikatakan bahwa memang Tujuan Pendidikan Nilai telah mengindikasikan keseimbangan IQ, EQ dan SQ. Calon sarjana sebagai *output* pendidikan tinggi diharapkan bisa mengembangkan potensinya secara berimbang antara

kemampuan IQ, EQ, dan SQ. Namun yang terjadi, keseimbangan ketiga Q itu baru terlaksana sebatas pada tataran teoritis-normatif saja, tetapi dalam tataran praksis masih jauh dari kenyataan. IQ masih mendapat porsi yang sangat besar dalam MKDU. Sedangkan EQ dan SQ yang seharusnya mendapat porsi yang berimbang belum terintegrasi secara utuh dalam program pendidikan. Hal tersebut terlihat dari kedudukan studi moral Pancasila, agama, maupun kewarganegaraan yang masih paralel (*juxtaposition*, baca: berjalan masing-masing/sejajar) tidak saling memberikan pengaruh dan juga pada dan juga dari isi kajian materi pendidikan umum yang masih didominasi oleh pengetahuan faktual.

## **B. REKOMENDASI**

Untuk memperbaiki pelaksanaan Pendidikan Nilai dalam MKDU FPIPS, kiranya perlu diperhatikan beberapa saran sebagai berikut.

Karena MKDU mengemban visi dan misi universitas, yaitu untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pendidikan yang terlalu terfokus pada kemampuan nalar dan juga karena luasnya cakupan MKDU (tidak hanya IPS) maka status kelembagaan MKDU harus dirubah dari jurusan di bawah FPIPS menjadi fakultas tersendiri.

Isi pesan nilai yang diemban dalam MKDU harus dijabarkan mulai dari tataran konseptual sampai pada tataran praksis (sampai pada pokok-pokok bahasan materi), seperti nilai moral apa yang dijabarkan dan juga harus disampaikan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nilai.

Evaluasi pendidikan umum harus dirubah sedemikian rupa sehingga bisa mengukur tidak saja kemampuan kognitif siswa (*factual judgement*) tetapi juga *value judgement* siswa. Davis (1968), seperti dikutip Brumfit & Johnson (1979) menyatakan bahwa sebuah tes tidak saja harus merefleksikan silabus yang menjadi dasar pembuatan tes tersebut, tetapi harus merefleksikan suatu teori yang valid. Jika bentuk tes-nya *paper pencil test* (UTS dan UAS), tentu saja bukan hanya tidak merefleksikan silabus pendidikan nilai, tetapi juga sama sekali tidak merefleksikan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam pendidikan nilai.

Peneliti juga merekomendasikan model hipotetikal pendidikan nilai yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan bidang-bidang studi lainnya. Misalnya, nilai sportivitas yang terintegrasi pada materi ajar pendidikan olah raga atau nilai kejujuran yang diajarkan dalam matematika atau sastra. Matematika tidak saja diajarkan menghafal rumus-rumus dan mengaplikasikannya dalam *problem solving*, tetapi bagaimana mengaplikasikan hukum-hukum matematis tersebut sebagai pendidikan nilai. Model tersebut dinamakan "Model pendidikan nilai dengan penilaian simulasi perilaku". Model ini bisa menilai perilaku siswa yang dianalogikan dengan situasi yang sebenarnya.

Akhir juni tahun 2005 ini perusahaan penerbangan Lion Air mengembangkan "model pelatihan pilot melalui simulasi cockpit simulator", di mana siswa bisa belajar menerbangkan pesawat seperti dalam situasi yang sebenarnya cukup hanya dari dalam cockpit simulatornya saja tanpa harus betul-betul terbang. Dengan metoda ini keahlian untuk menerbangkan pesawat dapat dipelajari dengan lebih mudah.



Terakhir, peneliti menganjurkan para pendidik di lingkungan MKDU IPS UPI untuk melaksanakan penelitian-penelitian lebih lanjut yang lebih intensif berkaitan dengan fenomena Pendidikan Nilai. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau memperbaiki berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan nilai dan juga bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi siapapun yang terkait dengan Pendidikan Nilai.

### **C. IMPLIKASI HASIL TEMUAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penilaian atas temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, tentu memberikan implikasi terhadap pengembangan pendidikan nilai yang “benar” sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nilai khususnya, dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Implikasi penelitian ini sekurang-kurangnya akan memberikan masukan dalam:

#### **1. Pengembangan Pendidikan Nasional**

Hakekat tujuan pendidikan nasional menghendaki keseimbangan IQ, EQ, dan SQ, maka oleh karena itu praktek pendidikan harus mengindikasikan keseimbangan ketiga Q tersebut. Selama ini sasaran pendidikan masih timpang. Karena pendidikan kita masih dipengaruhi logika positivisme, maka sasaran pendidikan masih terlalu menekankan pencapaian kemampuan kognitif anak (IQ). Memang telah ada sekumpulan matakuliah (MKDU) yang dimaksudkan untuk menyeimbangkan ketiga Q tersebut. Tetapi hal tersebut baru dalam tataran konseptual dan normative saja, pada prakteknya MKDU dan bidang-bidang studi lain belum terintegrasi/masih berjalan

masing-masing. Tentu dalam pengembangan praktek pendidikan nasional harus dipikirkan bagaimana mengintegrasikan nilai ke dalam tiap-tiap bidang studi. Hal ini dimaksudkan agar nilai lebih ter-*internalized* pada diri siswa sebagai satu kesatuan menyatu dengan paradigma keilmuan yang ditekuninya.

## 2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Nilai

Kurikulum pendidikan nilai harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nilai. Tujuan kurikulum pendidikan nilai harus benar-benar untuk mengajarkan nilai. Kurikulum jangan hanya untuk mengembangkan kemampuan kognitif (IQ) semata, tetapi harus berimbang dengan kemampuan emosional (EQ) dan juga kemampuan spiritual (SQ).

Kurikulum yang ada sekarang masih berorientasi pada produk (*The Tyler Rationale model*). Hyman (1972) mengatakan bahwa "penentuan tujuan yang akan dicapai, materi dan metoda, organisasi guru siswa dan evaluasi dalam kurikulum dibuat secara linear". Restorasi kurikulum harus menunggu selesainya sebuah program pendidikan. Hal tersebut menyebabkan akselerasi pengembangan kurikulum berjalan lambat. Kesalahan paradigma kurikulum ini berlangsung berulang-ulang dari tahun 1957an sampai hari ini. Lazerzon dkk. (1985), menyebut fenomena tersebut sebagai *a déjà vu (a new curriculum, old issues)*. Walau kurikulumnya baru tetapi masalahnya sama seperti itu-itu juga. Pengembangan kurikulum harus berorientasi pada proses, dimana restorasi kurikulum tidak harus menunggu sebuah program "selesai" dilakukan. Restorasi kurikulum bisa dilakukan secara tandem.



### 3. Pengembangan Model Pendidikan Nilai

Pendidikan nilai dalam MKDU dan bidang studi lainnya masih berjalan masing-masing (*juxtaposition*), maka perlu kiranya dipikirkan untuk mengembangkan sebuah model yang mengintegrasikan nilai ke dalam bidang-bidang studi lain. Peneliti mengusulkan salah satunya yang mungkin bisa dikembangkan lagi oleh pihak yang terkait, yaitu: “model pendidikan nilai dengan menggunakan penilaian simulasi perilaku”. Di mana nilai yang terintegrasi dalam bidang studi tertentu bisa dievaluasi dengan penilaian simulasi yang diasumsikan dapat menggambarkan perubahan perilaku siswa dalam situasi yang sebenarnya.

### 4. Pengembangan Kompetensi Dosen.

Pertama perlu dibangun jalur komunikasi yang baik diantara para *stakeholders* di lingkungan UPI. Willinsky (2000:4) menekankan hal tersebut dengan mengatakan “...*helping to regain control of the scholarly communication system – a system that should exist chiefly for them, their students, and their colleagues in the worldwide scholarly community...*”, terutama pihak jurusan dengan pihak UPI yang selama ini kurang baik. Setelah itu baru bisa dikembangkan program-program inovatif untuk membantu pengembangan kompetensi dosen, seperti *training*, lokakarya dan seminar dan sebagainya yang dilandasi itikad baik betul-betul untuk mengembangkan kompetensi dosen di jurusan MKDU.

### 5. Pengembangan Materi

Materi harus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan nilai, utamanya materi tersebut harus memicu dan mengakomodir terjadinya proses *valuing*

(*emoting* dan *spiritualizing*) Nilai-nilai yang diajarkan harus dijelaskan per-pokok bahasan agar memperjelas nilai-nilai yang akan diajarkan. Materi juga harus sarat dengan konflik atau dilemma nilai dalam situasi-situasi yang berbeda-beda, sehingga materi seperti itu akan membantu siswa memperluas pandangannya akan konsep-konsep nilai dan juga berperilaku yang benar sesuai dengan konsep nilai yang ia yakini.

**6. Pengembangan Sistem Evaluasi**

Hasil dari sebuah program pendidikan tentunya harus bisa “diukur”. Masalahnya apakah kita telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau saja sebuah program pendidikan difokuskan pada pengembangan kemampuan kognitif (IQ) siswa, maka tentunya alat pengukurnya bisa saja dengan menggunakan “paper pencil test”. Tetapi bila yang akan diukur hasil dari pendidikan nilai tentu testnya akan sangat berbeda.

Nunnaly (1978) menyatakan bahwa kita bisa menggunakan *rating scale/numeric scale* atau menggunakan *personality test* untuk mengukur nilai. Butir-butir pertanyaan di dalam test tersebut menuntut *value judgement* siswa. Sehingga sangat cocok untuk mengukur berhasil tidaknya suatu program pendidikan nilai. Jurusan MKDU bisa saja mengembangkan jenis test untuk mengukur pendidikan nilai dalam MKDU, tetapi paling tidak sebuah test, mengadaptasi gagasan Johnson dan Brumfit (1979), harus memenuhi *content* dan *construct validity*-nya. Yang pertama bahwa sebuah test harus merefleksikan silabus dari mana test tersebut dikembangkan. Dan yang kedua sebuah tes harus betul-betul merefleksikan prinsip-prinsip teorinya, dalam hal ini teori-teori pendidikan nilai.